

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA

Suerdi *

Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**

Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H.M.Hum **

Kepolisian Resor Kota Besar Medan senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum peredaran narkotika di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Medan, bagaimana hambatan dalam penanggulangan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Medan dan solusi mengatasinya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Polresta Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pengaturan hukum peredaran narkotika di Indonesia ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakukan razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan secara langsung).

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Medan adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Peranan, Penanggulangan, Narkotika

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

** Dosen Pembimbing I dan I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN OVERCOMING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS TRAFFICKING IN THE JURISDICTION OF THE MEDAN BIG CITY RESORT POLICE AND SURROUNDING

Suerdi *

Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**

Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H.M.Hum **

Medan City Resort Police always makes efforts to reduce the level of abuse and illicit trafficking of narcotics in Medan City. The formulation of the problem in this research is how the law regulates the circulation of narcotics in Indonesia, how the law is enforced against the circulation of narcotics in the jurisdiction of the Medan Police, what are the obstacles in overcoming the circulation of narcotics in the jurisdiction of the Medan Police and solutions to overcome them.

This research is descriptive analytical research that leads to empirical juridical research. The data sources in this research are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the Medan Police. Data collection tools are library research and field research.

The legal regulation of narcotics distribution in Indonesia is stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that the dealer is subject to sanctions with the heaviest punishment, namely the death penalty as contained in Articles 114 and 119. The spirit and objectives of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics in Indonesia. Law enforcement against the circulation of narcotics in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police includes non-penal policy efforts, namely pre-emptive (counseling) and preventive (prevention) efforts. The pre-emptive effort taken was to carry out dialogue patrols, while the preventive effort taken was to carry out raids at night entertainment venues. Efforts to overcome this through penal policy focus more on repressive actions (direct action).

Based on the results of the discussion, it is known that the obstacles to eradicating narcotics trafficking in the jurisdiction of the Medan Police are due to limited investigative personnel, limited budget and the ability of investigators in the process of investigating narcotics crimes.

Keywords: Role, Prevention, Narcotics

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I and I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*